

URGENSI MEMBANGUN MASYARAKAT SADAR BENCANA

Rohani Budi Prihatin

13

Abstrak

Memasuki awal tahun 2021 ini, masyarakat dikejutkan dengan berbagai bencana alam beruntun seperti tanah longsor di Sumedang (9/01/2021), banjir di Kalimantan Selatan (11/01/2021), gempa bumi di Sulawesi Barat (15/01/2021) dan erupsi Gunung Semeru (16/01/2021). Tulisan ini membahas mengenai perlunya membangun dan mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui konsep Masyarakat Sadar Bencana (MSB) serta kiat sukses negara Jepang dalam menghadapi bencana alam. Penanganan bencana di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan fokus pada tindakan pascabencana. Dengan mengimplementasikan MSB, maka walaupun tidak mampu mencegah terjadinya bencana maka setidaknya mampu mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih banyak. Guna membangun MSB, DPR RI dapat memaksimalkan ketiga fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, secara momentum bertepatan dengan Komisi VIII sedang merevisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga substansi mewujudkan MSB ini dapat dicantumkan sebagai norma pada pasal-pasalunya.

Pendahuluan

Mengawali tahun 2021 ini, bencana alam seolah datang silih berganti tanpa henti. Di mulai dari tanah longsor di Sumedang (9/01/2021), banjir di Kalimantan Selatan (11/01/2021), gempa bumi di Sulawesi Barat (15/01/2021) hingga erupsi Gunung Semeru (16/01/2021). Menurut prediksi BMKG, peluang terjadinya bencana masih terbuka sampai Maret 2021 (mediaindonesia.com, 2021). Banyaknya kejadian bencana

tersebut setidaknya membuktikan bahwa letak geografis, gugus wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis telah menempatkan Indonesia sebagai wilayah dengan risiko bencana kategori tinggi.

Penyebab tanah longsor di Sumedang menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM adalah karena proses pelapukan tanah di lokasi bencana yang berupa lereng terjal



dengan permukiman penduduk yang tepat di bawahnya (liputan6.com, 11 Januari 2021). Sementara itu, penyebab banjir di Kalimantan Selatan di samping karena curah hujan yang begitu tinggi juga karena penurunan luas lahan hutan (kompas.com, 17 Januari 2021).

Secara umum, bencana terbagi menjadi faktor alam maupun nonalam (bpbdd.pringsewakab.go.id, 5 Januari 2020). Kedua tipe bencana ini, frekuensinya semakin meningkat, baik dari sisi karakteristik maupun tingkat risikonya. Dalam konteks mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, maka menjadi agenda penting ke depan adalah bagaimana masyarakat Indonesia untuk sesegera mungkin mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa bumi yang mereka pijak merupakan wilayah yang rawan dengan berbagai macam bencana. Tulisan ini membahas mengenai konsep dan pentingnya mewujudkan Masyarakat Sadar Bencana (MSB) bagi seluruh lapisan masyarakat serta kiat sukses negara Jepang dalam menghadapi bencana alam.

Konsep Masyarakat Sadar Bencana

Secara definisi, Masyarakat Sadar Bencana (MSB) merupakan suatu kondisi ideal di mana masyarakat telah memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Dengan begitu mereka memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di wilayah

yang rawan bencana dengan sebaik-baiknya. Di samping itu dapat pula berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana (Harini, 2010: 168).

Harus diakui, strategi yang digunakan dalam mengelola bencana alam di Indonesia, terutama dari sisi sadar bencana, selama ini masih bersifat reaktif. Meskipun kebanyakan orang masih hidup dan mencari kehidupan di tengah-tengah wilayah berisiko tinggi bencana namun sebenarnya mereka tidak benar-benar siap menghadapi bencana. Buktinya bahwa kebanyakan warga masih menggunakan pandangan fatalistik dengan menerima apa yang diberikan alam dan melihat kejadian bencana alam sebagai takdir yang tak terelakkan. Padahal berbagai literatur membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan yang wajib diadopsi dan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Ada berbagai pendekatan dalam manajemen bencana, di antaranya adalah pendekatan melalui pencegahan, di mana masyarakat diharapkan dapat belajar sekaligus berlatih melakukan program mitigasi bencana seperti latihan penyelamatan di saat tsunami (*tsunami drill*) sehingga ketika terjadi bencana yang sebenarnya, masyarakat dapat secara aktif

melakukan upaya penyelamatan, bukan hanya pasif menunggu datangnya bantuan penyelamatan atau pertolongan.

Beberapa program memang telah dilakukan pemerintah, di antaranya program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang bertujuan untuk memberikan kesiapan khusus serta wawasan mengenai mitigasi bencana sehingga masyarakat siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (bnpb.go.id, 3 Mei 2016). Selain Destana, Kemensos juga membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Sayangnya baik Destana maupun Tagana belum sepenuhnya mampu mewujudkan MSB.

Sejak 2007, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut UU ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Terkait dengan mitigasi bencana, seringkali masih terkendala dengan persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang apa dan bagaimana cara menghadapi bencana alam. Harus diakui, memang tidak mudah membentuk cara pandang masyarakat agar menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.

Sebagai contoh, jika konsep MSB dihubungkan dengan kejadian bencana longsor di

Sumedang maka data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Kementerian ESDM ini harus dipertimbangkan baik-baik oleh Pemkab Sumedang dan Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Terjadi Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada Bulan Januari 2021, Kecamatan Cimanggung termasuk dalam zona potensi gerakan tanah Menengah-Tinggi (www.esdm.go.id; 13 Januari 2021). Artinya daerah ini mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Berdasarkan kondisi morfologi tersebut sekaligus dihubungkan dengan konsep MSB, maka Pemkab Sumedang dan Pemprov Jawa Barat sudah seharusnya melarang aktivitas membangun pemukiman penduduk di wilayah-wilayah lereng perbukitan yang terjal tersebut.

Harapannya ke depan masyarakat dapat memahami siklus penanggulangan bencana, yakni pencegahan, mitigasi, rencana siaga, peringatan dini, kesiapsiagaan, kajian darurat, rencana operasional, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada level yang lebih makro, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam implementasi program ini diharapkan akan memberikan kekuatan yang tangguh dalam menerapkan hidup harmoni berdampingan dengan risiko bencana (*living in harmony with disaster risks*). Sementara pada level mikro/

keluarga, ke depan harus mewujudkan keluarga yang sadar bencana, terutama di wilayah-wilayah rawan. Sedangkan pada level meso/komunitas, masyarakat perlu membentuk komunitas sadar bencana agar kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dapat terus ditingkatkan.

Pelajaran dari Jepang

Terkait dengan upaya membangun dan mewujudkan MSB maka ada baiknya belajar dari masyarakat Jepang. Jepang merupakan negara yang rentan alami bencana ia juga dikenal memiliki manajemen tanggap bencana yang efektif sehingga selalu cepat dalam penanganan korban (Mimaki and Shaw, 2014).

Diawali adanya anggapan dan persepsi bahwa bencana gempa akan terjadi berulang, maka pemerintah dan masyarakat Jepang merancang dan membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa. Selain itu, mereka juga melakukan pemeliharaan lingkungan hidup secara konsisten, seperti perlindungan hutan di pesisir samudra (*coastal forests* atau *hutan mangrove*) dan perlindungan awal gelombang tsunami (dengan menempatkan batu-batu pemecah ombak di tepian pantai untuk mengurangi dampak tsunami).

Salah satu yang bisa dipelajari pemerintah dan masyarakat dari Jepang adalah mereka mengembangkan secara terus-menerus sistem tanggap darurat bencana.

Belajar dari pengalaman Jepang, maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini, membangun infrastruktur bangunan yang tahan gempa, membangun jalur evakuasi bagi keselamatan warga, dan pendidikan menghadapi bencana yang diberikan kepada anak-anak sejak usia dini.

Hasil survei di Jepang pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji 1995 menunjukkan bahwa persentase korban selamat disebabkan oleh karena upaya diri sendiri sebesar 35%, anggota keluarga 31,9%, teman atau tetangga 28,1%, orang lewat 2,60%, Tim SAR 1,70%, dan lain-lain 0,90%. Berdasarkan data ini, maka faktor yang paling menentukan dalam menghadapi datangnya bencana adalah penguasaan pengetahuan yang dimiliki “diri sendiri” untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman risiko bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017: 12).

Penutup

Sebagai negara yang rawan bencana, Pemerintah Indonesia harus terus membangun kesadaran warganya dalam mempersiapkan terjadinya bencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan bencana yang selama ini dilakukan di Indonesia masih parsial khususnya fokus pada tindakan pascabencana. Hal-hal yang bersifat mencegah atau menekan angka korban jiwa dan harta serta upaya mewujudkan MSB masih sering terabaikan.

DPR RI melalui tiga fungsi yang dimiliki harus bisa mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan para pemegang kebijakan penanggulangan bencana untuk mewujudkan lahirnya MSB melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kewaspadaan akan terjadinya bencana. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mitigasi bencana dengan memperhatikan tata ruang penggunaan wilayah dari segi kebencanaan yang sebaiknya diatur dalam Revisi UU Penanggulangan Bencana yang saat ini sedang dibahas di Komisi VIII.

Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2017. *Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana: Membangun Kesadaran dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Harini, Sri. 2021. Membangun Masyarakat Sadar Bencana. *Jurnal Dakwah*, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010, hal. 157-171. Link <https://media.neliti.com/media/publications/76324-ID-membangun-masyarakat-sadar-bencana.pdf>, diakses 17 Januari 2021.

"Hasil Analisis LAPAN Soal Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan," 17 Januari 2021, [https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/190400965/hasil-analisis-lapan-soal-penyebab-](https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/190400965/hasil-analisis-lapan-soal-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=all)

[banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/190400965/hasil-analisis-lapan-soal-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=all), diakses 17 Januari 2021.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. 2021. "Laporan dan Rekomendasi Gerakan Tanah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat," 13 Januari, 2021. <https://vsi.esdm.go.id/index.php/gerakan-tanah/kejadian-gerakan-tanah/3390-laporan-dan-rekomendasi-gerakan-tanah-kec-cimanggung-kabupaten-sumedang-provinsi-jawa-barat>, diakses 16 Januari 2021.

Mimaki, Junko and Shaw, Rajib. 2014 "Community Development and Disaster Preparedness in a Depopulated Society: Case of Tosashimizu City, Kochi Prefecture." In Rajib Shaw, *Community Practices for Disaster Risk Reduction in Japan*, Springer Science & Business Media.

"Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana," 3 Mei 2016, <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>, diakses 17 Januari 2021.

"Pengertian Bencana dan Jenis-Jenisnya," 5 Januari 2020, <http://bpbd.pringsewukab.go.id/pengertian-bencana-dan-jenis-bencana/>, diakses 18 Januari 2021.

"Potensi Bencana Hingga Maret," 18 Januari 2021. <https://>

mediaindonesia.com/
humaniora/377837/potensi-
bencana-hingga-maret,
diakses 26 Januari 2021.

“PVMBG Ungkap 3 Penyebab
Bencana Longsor di
Sumedang,” 11 Januari 2021,

[https://www.liputan6.com/
regional/read/4453466/pvmbg-
ungkap-3-penyebab-bencana-
longsor-di-sumedang](https://www.liputan6.com/regional/read/4453466/pvmbg-ungkap-3-penyebab-bencana-longsor-di-sumedang), diakses 18
Januari 2021.



Rohani Budi Prihatin
rohani.prihatin@dpr.go.id

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 1996, S2 di Sosiologi Universitas Indonesia pada Tahun 2002, dan S3 Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan bidang kepakaran Sosiologi Perkotaan. Buku yang telah diterbitkan yaitu: "Banjir Jakarta: Warisan Alam dan Upaya Pengendalian, Yogyakarta: InsistPress, 2013"; dan "Dinamika Tata Kelola Air dan Banjir di Kota Jakarta, Malang: Instran, 2019."

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.